



BIMBINGAN TEKNIS PEMBUKUAN BAGI PENGELOLA BUMDes DI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

Neneng Salmiah¹, Satria Tri Nanda²,
Intan Adino³

¹) Akuntansi, Universitas Lancang
Kuning

²) Akuntansi, Universitas Lancang
Kuning

³) Akuntansi, Universitas Lancang
Kuning

Email : nenengsalmiah@unilak.ac.id

Abstraksi

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pembukuan bagi Pengelola BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah sehingga dapat melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban pada musyawarah desa pertanggungjawaban tahunan (MDPT). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penyuluhan dan simulasi pencatatan dan pelaporan keuangan Unit Usaha BUMDes sesuai dengan jenis unit usaha yang dijalankan. Materi yang diberikan meliputi jenis – jenis usaha, pencatatan menggunakan jurnal khusus, buku besar, neraca saldo dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka dilakukan pre dan post test. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat dari jawaban pre dan post test berkaitan dengan jenis usaha, siklus akuntansi, jenis laporan keuangan, standar akuntansi keuangan dan pencatatan dengan jurnal khusus dimana terjadi penurunan jawaban dari yang sebelumnya sebagian besar peserta menjawab tidak tahu dan setelah diberikan bimbingan teknis, jawaban tidak tahu rata-rata menjadi 0%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan pembukuan bagi pengelola BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Kata kunci: Akuntansi, BUMDes, Kampar Kiri Tengah

Abstract

This community service program aims to increase bookkeeping knowledge for BUMDes Managers in Kampar Kiri Tengah districts so that they can do recording and compile financial reports that are used as accountability at the annual accountability village meeting (MDPT). The method used in this activity is the method of counseling and simulating the financial recording and reporting of BUMDes Business Units according to the type of business unit being run. The material provided includes types of businesses, records using special journals, ledgers, trial balances and preparation of financial reports according to financial accounting standards. To measure the level of success of the activities that have been carried out, pre and post tests are carried out. The results of this community service activity can be seen from the pre and post test answers related to the type of business, the accounting cycle, the type of financial report, financial accounting standards and recording with special journals where there was a decrease in answers from previously, most of the participants answered they did not know and after given technical guidance, the answer did not know the average was 0%. This shows that there is an increase in bookkeeping knowledge for BUMDes managers in Kampar Kiri Tengah District.

Keywords: Accounting, BUMDes, Kampar Kiri Tengah

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Permendesa Nomor 4, 2015). BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa diharapkan mampu mengelola modal yang ditanamkan desa melalui pengelolaan berbagai unit usaha sesuai potensi desa. Dari pengelolaan berbagai unit usaha tersebut maka BUMDes akan menghasilkan keuntungan (*profit*). Sebagian keuntungan BUMDes akan dibagikan kepada desa. Bagian keuntungan inilah yang disebut dividen yang nantinya akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Desa (PADes), dimana peningkatan PADes merupakan salah satu tujuan BUMDes (Suryanto, 2018). Oleh karena itu pengelola BUMDes tentunya harus mampu membuat pembukuan yaitu membuat pencatatan sesuai unit usaha yang dijalankan sampai menyusun laporan keuangan.

Dari definisi BUMDes dapat dilihat bahwa modal BUMDes sebagian besar berasal dari Desa sehingga dalam pengelolaan BUMDes harus berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif, emansipatif, partisipatif, transparansi dan akuntabel (Hidayat, dkk, 2018). Bahkan bagi BUMDes yang memiliki unit usaha simpan pinjam, selain mendapatkan modal dari Desa juga mendapat tambahan modal dari masyarakat berupa simpanan masyarakat pada unit usaha simpan pinjam tersebut. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan BUMDes dilakukan secara baik yaitu tertib pembukuan sehingga tujuan BUMDes dapat tercapai.

Untuk mencapai tujuan BUMDes tersebut maka BUMDes dapat menjalankan berbagai jenis usaha, yaitu 1) bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi: a. air minum Desa; b. usaha listrik desa; c. lumbung pangan; dan d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya, 2) bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa meliputi : a. alat transportasi; b. perkakas pesta; c. gedung pertemuan; d. rumah toko; e. tanah milik BUMDes; dan f. barang sewaan lainnya, 3) usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga meliputi : a. jasa pembayaran listrik; b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan c. jasa pelayanan

lainnya, 4) bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas meliputi : a. pabrik es; b. pabrik asap cair; c. hasil pertanian; d. sarana produksi pertanian; e. sumur bekas tambang; dan f. kegiatan bisnis produktif lainnya, 5) bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa seperti dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa, 6) usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan meliputi : a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif; b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya (Permendesa Nomor 4, 2015).

Salah satu kunci keberlanjutan suatu usaha adalah adanya pembukuan yaitu pencatatan dan laporan keuangan yang rapi untuk setiap kegiatan yang dijalankan unit usaha BUMDes. Mayoritas bisnis yang sehat dan berkembang adalah mereka yang rapi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan dalam hal apapun. Tentunya karena BUMDes ini adalah bisnis, pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan adalah hal yang terpenting (Suryanto : 2018 : 121). Untuk melakukan pencatatan dan membuat laporan keuangan unit usaha BUMDes harus sesuai dengan jenis usaha dari unit tersebut, apakah usaha jasa, dagang atau industri.

"Pelaksana Operasional BUMDes, dalam hal ini Direktur BUMDes berwenang : a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan; b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan; c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun" (Permendesa Nomor 4, 2015). Kemudian pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa.

Kecamatan Kampar Kiri Tengah adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan Kampar Kiri Tengah memiliki 11 desa dimana semua desanya sudah membentuk BUMDes yang mengelola berbagai

jenis usaha, baik usaha jasa dan dagang. Adapun nama BUMDes pada 11 desa tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Dari tabel 1. Dapat dilihat bahwa 11 desa di Kecamatan Kampar Kiri Tengah sudah membentuk BUMDes dengan mengelola berbagai unit usaha. Unit usaha yang dijalankan oleh 11 BUMDes tersebut adalah usaha jasa dan dagang. Usaha jasa yang dikelola meliputi simpan pinjam, penyewaan tenda, hantraktor dan jasa BRLink. Usaha dagang yang dikelola meliputi waseda, dagang ATK, pupuk, dan saprodi. Dari table 1, dapat disimpulkan bahwa 11 BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah belum ada yang menjalankan usaha industri atau manufaktur.

Tabel 1. Daftar BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah

No.	Nama BUMDes	Jenis Usaha
1.	BUMDes Maju Bersama	Jasa simpan pinjam
2.	BUMDes Jaya Usaha	Jasa simpan pinjam
3.	BUMDes Bina Sejahtera	Jasa simpan pinjam
4.	BUMDes Berkah Karya	Jasa simpan pinjam
5.	BUMDes Karya Mandiri	Dagang ATK
6.	BUMDes Jaya Bersama	Dagang : Waserda
7.	BUMDes Wisnu Jaya	Jasa simpan pinjam
8.	BUMDes Mitra Mandiri Lestari	Jasa penyewaan tenda
9.	BUMDes Hayati	Dagang pupuk, waserda dan jasa penyewaan hantraktor
10.	BUMDes Bangun Sejahtera	Dagang pupuk, gas, waserda dan jasa BRlink
11.	BUMDes Langgeng Mulyo	Dagang saprodi, waserda

Hal ini menjadi dasar tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PKM) melakukan survey ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kampar dan mengadakan wawancara dengan pihak terkait. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa latar belakang pendidikan 11 orang pelaksana operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah yaitu 4% lulusan S1 dan 96% lulusan SLTA. Semua pelaksana operasional BUMDes tersebut tidak ada yang memiliki latar belakang Ilmu Akuntansi. Sehingga Tim Pelaksana PKM diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis pembukuan yaitu pencatatan dan pelaporan keuangan unit-unit usaha BUMDes, tentunya sesuai dengan jenis usaha dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Target dan Luaran

Sehubungan dengan permasalahan mitra yang telah diuraikan di atas maka dibutuhkan solusi yaitu pemberian pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis tentang pembukuan yang meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai jenis usaha kepada Pengelola/Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Luaran pada pengabdian ini adalah peningkatan pengetahuan pembukuan yaitu pencatatan dan pelaporan keuangan Unit Usaha BUMDes bagi Pengelola/Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan dan bimbingan teknis. Untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan ini maka dilakukan evaluasi terhadap kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning sebagai salah satu Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 11 Juni 2020 pukul 09.00 – 16.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Desa Bukit Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Peserta PKM yang akan diberikan bimbingan teknis mengenai pembukuan (pencatatan dan pelaporan keuangan) Unit Usaha BUMDes yaitu Pengelola/Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Seharusnya masing-masing BUMDes dapat mengikutsertakan semua kepala unit usahanya jika BUMDes tersebut memiliki lebih dari satu unit usaha namun karena saat ini adalah fase *new normal* dari Pandemi Covid 19 maka pelaksanaan PKM mengikuti protokol kesehatan Covid 19 sebagaimana ditegaskan dalam surat pemberitahuan pelaksanaan PKM yang dikirim Kadis PMD Kabupaten Kampar untuk Camat Kecamatan Kampar Kiri Tengah yang selanjutnya diteruskan ke masing-masing desa yang ada di kecamatan tersebut, dimana salah satunya adalah membatasi jumlah peserta yaitu masing-masing desa hanya mengutus salah seorang Pengelola BUMDes. Sehingga jumlah peserta yang diundang adalah 11 orang Pengelola/Pelaksana Operasional BUMDes dari 11 BUMDes yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Adapun suasana pelaksanaan kegiatan PKM ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Suasana Pelaksanaan PKM

Sebelum memberikan bimbingan teknis, tim pelaksana PKM mengajukan beberapa pertanyaan kepada sebagian peserta secara acak terkait konsep pencatatan dan pelaporan keuangan seperti konsep pendapatan dan laba, konsep harta, hutang, modal, pendapatan dan beban serta komponen laporan keuangan apa saja yang diketahui oleh peserta. Jawaban yang diberikan peserta menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami konsep tersebut bahkan peserta juga belum mengetahui komponen laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh BUMDes.

Selanjutnya, tim pelaksana PKM juga menyampaikan mengapa BUMDes penting melakukan pencatatan dan membuat laporan keuangan dimana salah satunya adalah sebagai pertanggungjawaban. Pengelola/Pelaksana operasional BUMDes kepada penasehat yang dalam hal ini secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa. Kemudian kepala desa akan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) minimal sekali setahun pada Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) atau Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUMDes (MPTB). Begitu seterusnya secara berjenjang sampai ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai pengawas dan Pembina.

Materi yang diberikan yaitu mengenai komponen laporan keuangan dan proses penyusunan laporan mulai dari pencatatan baik menggunakan jurnal umum atau jurnal khusus, buku besar, neraca saldo, pentingnya ayat jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup serta jurnal pembalik.

Pencatatan transaksi unit usaha BUMDes dapat menggunakan jurnal umum atau jurnal khusus (*special journal*). Pada kegiatan ini, pelaksana memberikan materi pencatatan menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari : 1) Jurnal penjualan/pendapatan, 2) Jurnal pembelian, 3) Jurnal penerimaan kas, 4) Jurnal pengeluaran kas,

dan 5) jurnal umum. Setelah melakukan pencatatan menggunakan jurnal khusus, kemudian memposting ke buku besar (*ledger*) untuk memperoleh saldo masing-masing akun. Saldo masing-masing akun diikhtisarkan dalam neraca saldo (*trial balance*). Pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian (*adjustment*) untuk akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian maka disusun laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan terdiri dari : 1) Laporan Laba/Rugi, 2) Laporan Perubahan Modal, 3) Neraca/Laporan Posisi Keuangan, 4) Laporan Arus Kas, dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disebut juga informasi keuangan. Peserta perlu memahami, agar informasi keuangan yang dihasilkan adalah wajar maka penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu, peserta perlu diberi pemahaman tentang SAK apa saja yang dapat digunakan oleh BUMDes.

BUMDes memiliki unit-unit usaha yang melakukan operasional di bidang jasa, dagang maupun industri yang bisa saja memiliki skala usaha mikro, kecil, menengah bahkan besar. Untuk itu peserta harus memiliki pengetahuan tentang kriteria untuk skala mikro, kecil, menengah dan besar. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan BUMDes bisa saja sesuai SAK EMKM atau SAK ETAP. Dan yang terpenting, peserta harus memahami bahwa yang melakukan pembukuan yaitu pencatatan dan menyusun laporan keuangan tersebut adalah masing-masing unit usaha BUMDes. Laporan keuangan masing-masing unit usaha tersebut dikonsolidasi menjadi laporan keuangan BUMDes.

Setelah memberikan penyuluhan tentang pencatatan dan pelaporan keuangan maka tim pelaksana PKM memberikan simulasi untuk membuat pembukuan (pencatatan dan pelaporan keuangan) salah satu unit usaha BUMDes yang dikelola oleh peserta untuk periode 1 bulan. Peserta diminta untuk melakukan pencatatan dengan jurnal khusus sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, membuat buku besar, neraca saldo sampai menyusun laporan keuangan tentunya dengan pendampingan dari tim pelaksana PKM.

Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan bimbingan teknis ini maka pelaksana melakukan evaluasi terhadap kuesioner pre dan post test. Rekapitulasi jawaban kuesioner dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1 jawaban pre-test pernyataan No.1 : "Untuk membuat pencatatan dan laporan keuangan Unit Usaha BUMDes harus

sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan, apakah usaha jasa, dagang, atau industri", dapat kita lihat bahwa sebesar 63,6% peserta menjawab tidak tahu. Setelah diberikan penyuluhan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan, terjadi perubahan jawaban tidak tahu menjadi sebesar 0%. Hal ini menunjukkan, sebelum dilakukan kegiatan PKM, sebagian besar (63,6%) Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah belum mengetahui bahwa untuk pencatatan dan pelaporan keuangan harus sesuai dengan karakteristik jenis usaha. Dan setelah diberikan bimbingan teknis, ada peningkatan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan.

Jawaban pre-test pernyataan No.2 : "Untuk membuat laporan keuangan dimulai dengan pencatatan, buku besar, neraca saldo, dan ayat jurnal penyesuaian", dapat kita lihat bahwa sebesar 90,9% peserta menjawab tidak tahu. Setelah diberikan penyuluhan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan, terjadi perubahan jawaban tidak tahu menjadi sebesar 0%. Hal ini menunjukkan, sebelum dilakukan kegiatan PKM, sebagian besar (90,9%) Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah dalam membuat laporan keuangan belum melalui siklus akuntansi mulai dari pencatatan (jurnal) sampai ayat jurnal penyesuaian. Dan setelah diberikan bimbingan teknis, ada peningkatan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan.

Jawaban pre-test pernyataan No.3 : "Untuk membuat pencatatan dapat menggunakan jurnal khusus", dapat kita lihat bahwa sebesar 81,8% peserta menjawab tidak tahu. Setelah diberikan penyuluhan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan, terjadi perubahan jawaban tidak tahu menjadi sebesar 0%. Hal ini menunjukkan, sebelum dilakukan kegiatan PKM, sebagian besar (81,8%) Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah belum mengetahui bahwa untuk mencatat transaksi dapat menggunakan jurnal khusus yang terdiri dari jurnal pendapat/penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Dan setelah diberikan bimbingan teknis, ada peningkatan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan.

Jawaban pre-test pernyataan No.4 : "Untuk transaksi pendapatan/penjualan secara kredit dicatat dalam jurnal pendapatan/penjualan", dapat kita lihat bahwa sebesar 81,8% peserta menjawab tidak tahu. Setelah diberikan penyuluhan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan, terjadi perubahan jawaban

tidak tahu menjadi sebesar 0%. Hal ini menunjukkan, sebelum dilakukan kegiatan PKM, sebagian besar (81,8%) Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah belum mengetahui apa itu jurnal pendapatan/penjualan. Dan setelah diberikan bimbingan teknis, ada peningkatan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan.

Jawaban pre-test pernyataan No.5 : "Untuk transaksi pembelian perlengkapan, peralatan dan barang dagangan secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian", dapat kita lihat bahwa sebesar 81,8% peserta menjawab tidak tahu. Setelah diberikan penyuluhan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan, terjadi perubahan jawaban tidak tahu menjadi sebesar 18,2%. Hal ini menunjukkan, sebelum dilakukan kegiatan PKM, sebagian besar (81,8%) Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah belum mengetahui apa itu jurnal pembelian. Dan setelah diberikan bimbingan teknis, ada peningkatan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan.

Jawaban pre-test pernyataan No.6 : "Untuk transaksi penerimaan piutang usaha, pendapatan/penjualan tunai dicatat dalam jurnal penerimaan kas", dapat kita lihat bahwa peserta menjawab sangat setuju sebesar 54,5%, setuju sebesar 36,4% dan tidak tahu sebesar 9,1%. Setelah diberikan penyuluhan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan, terjadi perubahan jawaban yaitu sangat setuju sebesar 81,8%, setuju sebesar 18,2% dan tidak tahu menjadi sebesar 0%. Hal ini menunjukkan, sebelum dilakukan kegiatan PKM, sebagian besar (54,5% + 36,4%) Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah sudah mengetahui apa itu jurnal penerimaan kas.

Jawaban pre-test pernyataan No.7 : "Untuk transaksi pembayaran beban gaji, beban listrik, pembelian perlengkapan, barang dagangan, peralatan secara tunai dicatat dalam jurnal pengeluaran kas", dapat kita lihat bahwa peserta menjawab sangat setuju sebesar 63,6%, setuju sebesar 36,4% dan tidak tahu sebesar 0%. Setelah diberikan penyuluhan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan, terjadi perubahan jawaban yaitu sangat setuju sebesar 90,9%, setuju sebesar 9,1% dan tidak tahu menjadi sebesar 0%. Hal ini menunjukkan, sebelum dilakukan kegiatan PKM, sebagian besar (63,6% + 36,4%) Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah sudah mengetahui apa itu jurnal pengeluaran kas.

Jawaban pre-test pernyataan No.8 : "Untuk menyusun laporan keuangan BUMDes harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)", dapat kita lihat bahwa sebesar 90,9% peserta menjawab tidak tahu. Setelah diberikan penyuluhan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan, terjadi perubahan jawaban tidak tahu menjadi sebesar 0%. Hal ini menunjukkan, sebelum dilakukan kegiatan PKM, sebagian besar (90,9%) Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah belum mengetahui bahwa untuk menyusun laporan keuangan BUMDes harus sesuai SAK. Dan setelah diberikan bimbingan teknis, ada peningkatan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan.

Jawaban pre-test pernyataan No.9 : "Laporan keuangan BUMDes terdiri dari Laporan L/R, Laporan perubahan modal, Neraca, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan", dapat kita lihat bahwa sebesar 100% peserta menjawab tidak tahu. Setelah diberikan penyuluhan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan, terjadi perubahan jawaban tidak tahu menjadi sebesar 0%. Hal ini menunjukkan, sebelum dilakukan kegiatan PKM, semua Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah belum mengetahui komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh BUMDes. Dan setelah diberikan bimbingan teknis, ada peningkatan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan.

Jawaban pre-test pernyataan No.10 : "Laporan keuangan BUMDes adalah gabungan dari laporan keuangan Unit-unit Usaha BUMDes", dapat kita lihat bahwa peserta menjawab sangat setuju sebesar 27,3%, setuju sebesar 54,5% dan tidak tahu sebesar 18,2%. Setelah diberikan penyuluhan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan, terjadi perubahan jawaban yaitu sangat setuju sebesar 90,9%, setuju sebesar 9,1% dan tidak tahu menjadi sebesar 0%. Hal ini menunjukkan, sebelum dilakukan kegiatan PKM, sebagian besar (27,3% + 54,5%) Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah sudah mengetahui bahwa laporan keuangan BUMDes adalah penggabungan dari laporan keuangan Unit-unit Usaha BUMDes.

Pembahasan

Semua materi yang telah dipersiapkan, dapat disampaikan kepada peserta sesuai waktu yang telah ditentukan dan peserta dapat mengikutinya dengan baik. Begitu juga dengan kegiatan bimbingan teknis berupa simulasi pencatatan dan pelaporan keuangan salah satu unit usaha yang dikelola BUMDes, sebagian besar peserta antusias

mengikutinya dan mengerjakan ilustrasi yang diberikan. Begitu juga pada sesi tanya jawab, terlihat antusiasme peserta mengajukan pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta tentang pencatatan dan pelaporan keuangan Unit Usaha BUMDes.

Berdasarkan jawaban pre dan post test pada tabel 1. pernyataan No. 1, dapat kita lihat bahwa sebelum penyuluhan, peserta yang dalam hal ini adalah perwakilan pelaksana operasional BUMDes, belum mengetahui bahwa untuk membuat pencatatan dan laporan keuangan Unit Usaha BUMDes harus sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan, apakah usaha jasa, dagang, dan industri. Artinya sebelum membuat pencatatan dan laporan keuangan, pelaksana operasional BUMDes seharusnya memahami karakteristik usaha yang dijalankannya. Setelah diberikan penyuluhan dan bimbingan teknis, sebagian besar peserta sudah mengetahui karakteristik unit usaha yang dijalankannya dan diharapkan di masa yang akan datang dapat membuat pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai jenis usaha dari masing-masing Unit Usaha BUMDes.

Berdasarkan jawaban pre dan post test pada tabel 1. pernyataan No.2 dapat kita lihat bahwa sebelum diberikan penyuluhan, peserta yang dalam hal ini adalah perwakilan pelaksana operasional BUMDes, belum mengetahui bahwa untuk membuat laporan keuangan harus mengikuti proses mulai dari pencatatan (jurnal), buku besar, neraca saldo sampai ayat jurnal penyesuaian, jurnal penutup dan jurnal pembalik. Dengan kata lain, proses pembuatan laporan keuangan ini disebut dengan siklus akuntansi. Artinya sebelum diberikan penyuluhan dan bimbingan teknis, peserta belum mengetahui cara mencatat transaksi apakah dengan jurnal umum atau jurnal khusus, begitu juga dengan buku besar dan seterusnya. Setelah diberikan penyuluhan dan bimbingan teknis, peserta sudah mengetahui siklus akuntansi atau proses untuk membuat laporan keuangan.

Berdasarkan jawaban pre dan post test pada table 1. pernyataan No.3 sampai dengan No.7 dimana berkaitan dengan pencatatan menggunakan jurnal khusus, dapat kita lihat bahwa sebelum diberikan penyuluhan dan bimbingan teknis, khusus untuk pernyataan No.3 sampai dengan No.5, sebagian besar peserta belum mengetahui apa itu jurnal khusus, jurnal pendapatan/penjualan, jurnal pembelian dan setelah diberikan penyuluhan pengetahuan maka peserta sudah mengetahui

bahwa transaksi unit usaha BUMDes dapat dicatat dengan jurnal khusus, transaksi pendapatan/penjualan secara kredit dicatat dalam jurnal pendapatan/penjualan dan transaksi pembelian secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian. Berbeda halnya dengan pernyataan No.6 tentang jurnal penerimaan kas dan No.7 tentang jurnal pengeluaran kas dimana sebagian besar peserta sudah tidak asing lagi dengan yang namanya jurnal atau buku penerimaan dan pengeluaran kas.

Berdasarkan jawaban pre dan post test pada tabel 1. pernyataan No.8 dapat kita lihat bahwa sebelum diberikan penyuluhan, sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa untuk menyusun laporan keuangan Unit Usaha BUMDes harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan setelah diberikan penyuluhan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan, peserta sudah mengetahui bahwa untuk menghasilkan informasi (laporan keuangan) yang wajar maka penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan SAK dimana BUMDes dapat menggunakan SAK ETAP atau SAK EMKM bahkan jika unit usahanya berbasis syariah maka penyusunan laporan keuangannya sesuai SAK Syariah.

Berdasarkan jawaban pre dan post test pada tabel 1. pernyataan No.9 dapat kita lihat bahwa sebelum diberikan penyuluhan, semua peserta belum mengetahui komponen laporan keuangan apa saja yang seharusnya dibuat oleh Unit Usaha BUMDes dan setelah diberikan penyuluhan dan bimbingan teknis, peserta sudah mengetahui bahwa laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh Unit Usaha BUMDes adalah Laporan L/R, Laporan Perubahan Modal, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan atau minimal Laporan L/R, Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan jawaban pre dan post test pada tabel 1. pernyataan No.10 dapat kita lihat bahwa sebelum diberikan penyuluhan, sebagian besar peserta sudah mengetahui bahwa laporan keuangan BUMDes merupakan gabungan dari laporan keuangan Unit-unit usaha BUMDes. Artinya masing-masing Kepala Unit Usaha BUMDes harus membuat laporan keuangan dan bendahara BUMDes akan membuat laporan keuangan BUMDes. Selanjutnya Direktur BUMDes akan memberikan laporan keuangan BUMDes tersebut kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa akan mempertanggungjawabkannya kepada BPD pada musyawarah desa pertanggungjawaban tahunan

(MDPT) atau musyawarah pertanggungjawaban tahunan BUMDes (MPTB).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberian penyuluhan dalam bentuk bimbingan teknis tentang pembukuan yaitu pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai jenis usaha kepada Pengelola/Pelaksana Operasional BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah telah terlaksana dengan baik dan hasilnya ada peningkatan pengetahuan pencatatan dan pelaporan keuangan bagi Pengelola/Pelaksana Operasional BUMDes yang meliputi jenis usaha, komponen laporan keuangan, siklus akuntansi, jurnal khusus, penyusunan laporan keuangan dan SAK.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka Tim Pelaksana PKM memberikan saran sebagai berikut : Pertama, perlu adanya kegiatan pendampingan bagi Pengelola/Pelaksana Operasional BUMDes dalam membuat pembukuan yaitu pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan jenis usaha yang dikelola dan sesuai SAK. Kedua, Perlu dilakukan kegiatan PKM lanjutan tentang pembukuan yaitu pencatatan dan pelaporan keuangan Unit Usaha BUMDes secara komputisasi.

Referensi

- Hidayat, dkk, 2018, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang, Jurnal COMVICE Vol.2 No.1
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Salmiah Neneng, 2019, Pengantar Akuntansi 1, Cetakan Pertama, Unilak Press
- Sekolah Manajemen BUMDes, 2017, Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa – Seri Pembentukan BUM Desa
- Suryanto Rudy, 2018, Peta Jalan BUMDes Sukses, PT.Syncore Indonesia
- Utami, C. W., 2004, Peningkatan Nilai Perusahaan melalui Perbaikan Produktivitas dan Kualitas pada Sektor Jasa Sebuah Analisis Konseptual, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan
- <http://iailounge.iaiglobal.or.id/Home>

Tabel 1

Rekapitulasi jawaban kuesioner pre dan post-test kegiatan pengabdian kepada masyarakat

No	Pilihan Jawaban	Pre-Test (%)						Post-Test (%)					
		SS	S	TT	TS	STS	Total	SS	S	TT	TS	STS	Total
1	Untuk membuat pencatatan dan laporan keuangan Unit Usaha BUMDes harus sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan, apakah usaha jasa, dagang, atau industri	9.1	27.3	63.6	0	0	100	90.9	9.1	0	0	0	100
2	Untuk membuat laporan keuangan dimulai dengan pencatatan, buku besar, neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian	0	9.1	90.9	0.0	0	100	81.8	18.2	0	0.0	0	100
3	Untuk membuat pencatatan dapat menggunakan jurnal khusus	0	18.2	81.8	0	0	100	63.6	36.4	0	0	0	100
4	Untuk transaksi pendapatan/penjualan secara kredit dicatat dalam jurnal pendapatan/penjualan	9.1	9.1	81.8	0	0	100	72.7	27.3	0	0	0	100
5	Untuk transaksi pembelian perlengkapan, peralatan dan barang dagangan secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian	0	18.2	81.8	0	0	100	63.6	18.2	18	0	0	100
6	Untuk transaksi penerimaan piutang usaha, pendapatan/penjualan tunai dicatat dalam jurnal penerimaan kas	54.5	36.4	9.1	0	0	100	81.8	18.2	0	0	0	100
7	Untuk transaksi pembayaran beban gaji, beban listrik, pembelian perlengkapan/barang dagangan/peralatan secara tunai dalam	63.6	36.4	0	0	0	100	90.9	9.1	0	0	0	100
8	Untuk menyusun laporan keuangan BUMDes harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	9.1	0	90.9	0	0	100	72.7	27.3	0	0	0	100
9	Laporan keuangan BUMDes terdiri dari Laporan L/R, Laporan perubahan modal, Neraca, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan	0	0	100	0	0	100	81.8	18.2	0	0	0	100
10	Laporan keuangan BUMDes adalah gabungan dari laporan keuangan Unit-unit Usaha BUMDes	27.3	54.5	18.2	0	0	100	90.9	9.1	0	0	0	100

Sumber : Hasil pengolahan data excel 2020